

VERBAL VIOLENCE PERFORMED BY SUPPORTERS' GROUP OF GUBERNATORIAL CANDIDATES IN THE POLITICAL DISCOURSE OF JAKARTA ELECTION

KEKERASAN VERBAL OLEH KOMUNITAS PENDUKUNG PASLON DALAM WACANA POLITIK PILKADA DKI JAKARTA

Tria Putri Musika¹, Agustina²& Syahrul R³

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 25131

tripurimustika@gmail.com

Submitted: 2018-02-10
Accepted: 2019-09-20

Published: 2019-09-21

DOI: 10.24036/humanus.v18i1.9081

URL: <http://dx.doi.org/10.24036/humanus.v18i1.9081>

Abstract

This study aimed to describe the verbal violence performed by supporters' group of gubernatorial candidates in the discourse of Jakarta election 2017 in their community accounts on social media and its implications for language politeness. This research was a qualitative research with descriptive method. Analyzing data was done by content analysis method as a means to reveal, understand, and capture messages in data, and make conclusions obtained through identification and interpretation of data. The results of this study reveal that the delivery of comments by the supporters' group in the discourse of Jakarta Gubernatorial Election 2017 was dominated by the use of sarcasm (figure of speech), combined with expressive speech acts, and bald on record strategy without further ado. The total violation of the use of politeness principle shows that verbal violence dominates the expression of comments and 'high-potential' comments that threaten the recipients' face. Therefore, based on this research data, the politeness level of these selected groups is in the category of 'impolite'.

Keywords: *verbal violence, politeness, speech acts, political discourse*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekerasan verbal oleh pendukung paslon tentang wacana Pilkada DKI Jakarta 2017 dalam akun komunitasnya di media sosial dan implikasinya terhadap kesantunan berbahasa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penganalisisan data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengungkap, memahami, dan menangkap pesan dalam data, serta membuat simpulan yang diperoleh melalui identifikasi dan penafsiran data. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwapenyampaian komentar oleh pendukung paslon tentang wacana Pilkada DKI didominasi dengan penggunaan majas sarkasme, jenis tindak tutur ekspresif, dan strategi terus-terang tanpa basa-basi.

Pelanggaran total terhadap penggunaan prinsip kesantunan menunjukkan bahwa kekerasan verbal mendominasi penyampaian komentar dan pendapat 'berpotensi tinggi' mengancam muka lawan tutur, sehingga berdasarkan data penelitian ini kesantunan berbahasa para komunitas pendukung paslon berada pada kategori 'tidak santun'.

Kata kunci: *kekerasan verbal, kesantunan, tindak tutur, wacana politik*

Pendahuluan

Demi kepentingan dan keuntungan politik, bahasa sebagai alat politik bisa menjadi tidak bernilai karena jatuh menjadi sarana untuk menyerang, menjatuhkan, mengumpat, bahkan sampai kepada mencaci-maki, dan menelanjangi kejelekan lawan politik (Adek, 2016; Agustina, 2017). Hal itu dibuktikan pula dari beberapa hasil penelitian, seperti di USA (Worthama & Locherb, 1999; Dus, Blitvitch, & Franch, 2011); di Liberia (Anderson, Diabah, & Mensa, 2011); di Perancis (Barnes & Larrivee, 2011); di Spanyol (Bermudez, 2014); di Pakistan (Yasmeen, Jabeen, & Akram, 2014); di Indonesia (Yusri, 2015); dan di Polandia (Cap, 2017). Dari penelitian tersebut terlihat bahwa penggunaan bahasa sebagai alat kerja sama sudah berubah arah sehingga memunculkan komplain dan polemik di tengah-tengah masyarakat (Agustina (2017, hal. 130). Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh para politikus dan elit politik serta jurnalis, melainkan juga oleh masyarakat umum yang sebagian besar terjadi dalam ranah komunikasi massa di media sosial.

Tidak sedikit dari mereka yang menyampaikan pendapat dengan menggunakan bahasa frontal, bahkan terkesan arogan sehingga berakibat munculnya kekerasan verbal. Apapun wujudnya, kekerasan merupakan tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan (Lardelleir dalam Haryatmoko, 2007, hal. 119), yang dapat berwujud verbal (Astuti, 2013, hal. 44), baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Lebih rinci Astuti (2013, hal 45) menjelaskan bahwa kekerasan verbal menggunakan kata-kata yang diucapkan dan ditulis, berupa memaki, menyindir, sumpah serapah, mengancam, serta mengeluarkan kata-kata kasar. Munculnya bentuk kekerasan verbal ini disanyalir dipicu oleh kebebasan pers di Indonesia yang semakin liberal sejak era reformasi (Erdinaya & Ardianto, 2004, hal..155). Kondisi demikian selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Peterson (2015) di India mengenai pers dan demokrasi. Kenyataan yang demikian, juga terjadi pada peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017, yang menurut Agustina (2017, hal. 130) merupakan Pilkada yang paling fenomenal dan kontroversial karena tidak hanya sarat dengan muatan politik, tetapi juga berimplikasi pada penggunaan bahasa sebagai sarana politiknya. Salah satunya, timbulnya penggunaan bahasa yang dapat digolongkan ke dalam bentuk kekerasan verbal. Padahal sejatinya dalam politik, kata-kata memiliki kekuatan yang dahsyat untuk mempengaruhi dan mengubah pandangan ke arah yang lebih baik (Agustina, 2017, hal. 131). Dengan demikian, penggunaan bahasa khususnya bentuk kekerasan verbal dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 penting untuk diteliti.

Penelitian ini berada dalam lingkup teori pragmatik dengan aspek tindak tutur, kesantunan, dan implikatur untuk mengungkap kekerasan verbal yang digunakan. Batasan pragmatik yang digunakan mengacu pada pendapat berikut, yaitu kajian bahasa yang menghubungkan bahasa dengan konteksnya (Levinson, 1983, hal.9); pembahasan makna yang dihubungkan dengan situasi-situasi ujar (Leech, 1986, hal.8).

Dengan demikian, pragmatik adalah pemakaian bahasa dari segi bentuk, makna, dan maksud yang dihubungkan dengan konteks dan fungsi tuturan tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian ini, untuk melacak fungsi dan makna kalimat-kalimat yang dituturkan oleh komunitas paslon tidak dapat dipisahkan dari konteks Politik Pilkada DKI sebagai penentu.

Searle (dalam Syahrul, 2008, hal. 32-33) mengelompokkan jenis tindak tutur ilokusi menjadi lima. (1) Tindak tutur representatif, bertujuan mengikat penutur kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya seperti: *menyatakan, melaporkan, dsb.*, sehingga tingkat kesantunan cenderung netral dan berfungsi kerja sama, kecuali *membual, berbohong, mengada-ada, dsb.* (2) Tindak tutur direktif, bertujuan agar mitra tutur melakukan yang disebutkan penuturnya, seperti *memerintah, menyarankan, menggurui, dsb.* yang bersifat kompetitif sehingga berpotensi mengancam muka; namun dapat dilunakkan dengan imperatif *persilaan, ajakan, dan larangan* (Rahardi, 2000, hal. 56). (3) Tindak tutur komisif, bertujuan mengikat penuturnya melaksanakan apa yang disebutkan seperti *berjanji, berkaul, dan menawarkan* yang bersifat menyenangkan, kecuali *memaksa, mengancam, dsb.* Lebih bersifat konfliktif sehingga sangat berpotensi mengancam muka mitra tuturnya. (4) Tindak tutur ekspresif, bertujuan sebagai evaluasi atas keadaan, seperti: *memuji, mengucapkan terima kasih, belasungkawa, dsb.* yang cenderung sopan dan menyenangkan, kecuali *mengecam, menuduh, dan sejenisnya* yang cenderung konfliktif sehingga berpotensi mengancam muka mitra tutur. (5) Tindak tutur deklaratif, bertujuan menciptakan status atau keadaan baru seperti *memutuskan, melarang, mengizinkan, mempengaruhi, dsb.* yang berfungsi netral karena dilakukan oleh penutur atau badan yang berwenang.

Strategi bertutur juga dibahas dalam penelitian ini karena penggunaan strategi bertutur bertujuan untuk mengurangi kekecewaan mitra tutur atas tindakan yang dilakukan oleh penutur. Dalam penelitian ini, strategi bertutur mengacu pada pendapat Brown & Levinson (1987, hal.103), yaitu (1) bertutur terus terang tanpa basa-basi, (2) bertutur dengan kesantunan positif, (3) bertutur dengan kesantunan negatif, (4) bertutur samar-samar, dan (5) bertutur dalam hati atau diam. Strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi disebut bertutur langsung sehingga strategi ini sangat berpotensi mengancam muka (Blum-Kulka, 1985, hal. 14).

Teori kesantunan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Lakoff (Syahrul, 2008, hal. 15), yaitu kesantunan merupakan sistem hubungan interpersonal yang dirancang untuk mempermudah interaksi dengan memperkecil potensi konflik dan konfrontasi; dan pendapat Frasser (Chaer, 2010, hal. 47) bahwa kesantunan sebagai properti yang harus disepakati bahwa penutur dan mitra tutur tidak melampaui hak-haknya dalam bertutur. Karena itu, Leech (1986) merumuskan enam prinsip kesantunan yang harus dipatuhi sebagai usaha untuk meminimalisir tuturan yang tidak sopan menjadi sekecil mungkin. (a) Maksim kearifan, yaitu penutur berusaha meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan orang lain. (b) Maksim kedermawanan, yaitu penutur memaksimalkan kerugian dan meminimalkan keuntungan pada diri sendiri. (c) Maksim approbation, yaitu penutur memaksimalkan rasa hormat dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. (d) Maksim kerendahan hati, yaitu penutur memaksimalkan ketidakhormatan dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. (e) Maksim kesepakatan, yaitu penutur memaksimalkan kecocokan dan meminimalkan ketidakcocokan pada orang lain. (f) Maksim

kesimpatian, yaitu penutur memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipasti kepada orang lain.

Menurut Brown dan Levinson (Chaer, 2010, hal. 49-52), teori kesantunan berbahasa identik dengan konsep muka (*face*), yang dibagi oleh (Yule, 2006) atas muka negatif dan muka positif. Menurut (Gunarwan, 1994, hal. 184) selain menyampaikan informasi tugas penutur juga menjaga dan memelihara hubungan sosial dengan mitra tutur. Akhirnya, Grice (Pranowo, 2009, hal. 6) merumuskan kembali menjadi “Pilihlah ungkapan yang tidak meremehkan status mitra tutur atau ungkapan yang paling kecil menyebabkan mitra tutur kehilangan muka”, dengan rincian: (1) jangan memperlakukan mitra tutur sebagai orang yang tunduk kepada penutur, atau mengeluarkan “biaya” sosial, fisik, psikologis, atau membatasi kebebasannya; (2) jangan mengatakan hal-hal yang kurang baik mengenai diri, orang, atau barang yang berkaitan dengan mitra tutur; dan (3) jangan mengungkapkan rasa senang atas kemalangan mitra tutur.

Untuk menentukan peringkat kesantunan para pendukung paslon dalam penelitian ini, digunakan skala kesantunan oleh Brown dan Levinson (1987, hal. 65-68) berdasarkan ‘tindakan yang mengancam muka’ (*Face Threatening Acts*) atau FTA dengan dua parameter. (1) Tindakan yang mengancam muka negatif, berupa perintah, ancaman, peringatan, tantangan, kebencian, kemarahan, dll. (2) Tindakan yang mengancam muka positif, berupa kritik, merendahkan/mempermalukan, dakwaan, penghinaan serta ungkapan yang bersifat memecah belah, ras, agama, pelecehan, dan identifikasi yang keliru mengenai lawan tutur. Selain itu, digunakan ‘skala ketidaklangsungan’ Blum-Kulka (1985, hal. 5-6) dengan rumus “Semakin langsung Anda menyampaikan tuturan, semakin tidak santun ungkapan Anda; namun semakin tidak langsung Anda menyampaikan tuturan, semakin santun ungkapan Anda”.

Santun tidaknya tuturan juga ditentukan dari bentuk pengungkapannya, misalnya dari majas yang dipilihnya sebagai gaya retorik penyampai komentar. Dalam penelitian ini, mengkaji penggunaan majas apakah berindikasi pada tindakan ‘kekerasan verbal’, maka digunakan teori yang dikemukakan oleh Levinson (1987) tentang kegunaan konsep implikatur yang keempat, yaitu “dapat menerangkan berbagai macam faktor/gejala yang secara lahiriah tidak berkaitan dan/atau berlawanan, seperti cara bekerjanya bentuk-bentuk majas (*figures of speech*) (Nababan, 1987, hal. 28).

Relevan dengan penelitian ini, majas yang sensitif mengancam kesantunan adalah Gaya Bahasa Sindiran dengan lima majas pengungkapnya. (1) Majas sarkasme, gaya bahasa sindiran yang paling kasar, pedas, cemoohan, hinaan dan ejekan kasar tanpa kiasan sehingga sangat menyakitkan hati bagi orang yang disindir. (2) Majas sinisme, gaya bahasa sindiran yang agak kasar. (3) Majas ironi, gaya bahasa sindiran yang paling halus, kadang yang disindir sampai tidak terasa, menggunakan kata-kata yang mengandung arti kebalikan. (4) Majas antifrasis, gaya bahasa sindiran yang diungkap dengan makna sebaliknya dari keadaan yang sebenarnya. (5) Majas inuendo, gaya bahasa sindiran yang memiliki sifat mengecilkan fakta yang sebenarnya. (Keraf, 2006; Aryani, 2015; Tarigan, 2013).

Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji masalah “Bagaimanakah penggunaan kekerasan verbal oleh komunitas pendukung paslon dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan bagaimanakah implikasinya terhadap kesantunan berbahasa?”, dengan empat fokus masalah: (1) jenis majas yang digunakan sebagai bentuk pengungkapan kekerasan verbal, (2) jenis tindak tutur yang dipilih, (3) strategi

bertutur yang diterapkannya, dan (4) bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip kesantunan oleh komunitas pendukung paslon dalam mengomentari wacana politik Pilkada DKI Jakarta. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk “mendeskripsikan penggunaan kekerasan verbal oleh komunitas pendukung paslon dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan implikasinya terhadap kesantunan berbahasa”.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu seperangkat prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, dalam Moleong, 2007, hal. 4); dengan menggunakan metode deskriptif. Data penelitian ini adalah komentar para pendukung paslon yang mengandung kekerasan verbal dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, terhitung sejak Desember 2016-Mei 2017; yang bersumber pada instagram akun komunitas para pendukung paslon di media sosial, yaitu “potretpolitik”, “politikcrazy.id”, “gembonk.politik”, “politikampus_”, dan “trolali.id”, “warkop.id”, dan “dpp_fpi”. Akun tersebut dipilih secara acak dan mewakili pendukung dari masing-masing paslon Pilkada DKI Jakarta 2017. Penganalisisan data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengungkap, memahami, dan menangkap pesan dalam data, serta membuat simpulan yang diperoleh melalui identifikasi dan penafsiran data (Endaswara, 2011, hal. 160).

Result and Discussion/Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan identifikasi data sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut.

Penggunaan Gaya dan Majas

Masyarakat yang bernaung dalam komunitas paslon ini, dalam berpendapat dan berkomentar umumnya menggunakan diksi dan ungkapan yang cenderung berada pada ranah kekerasan verbal. Hal ini terbukti bahwa dari 102 jumlah data, yang paling dominan mereka gunakan adalah majas sarkasme (55 data) dan sinisme (30 data); sedangkan ironi (16 data) dan antifrasis hanya (1 data), diantaranya terlihat pada contoh berikut ini, yaitu *sarkasme* (1-3), *sinisme* (4-5), *ironi*, (6-7), dan *antifrasis* (8).

1. **Pendukung Anies Sandi** Baswedan adalah: 1) **Rizieq Shihab** terlapor kasus **pencabulan**, 2) **Tommy Suharto** terpidana kasus **pembunuhan**, 3) **Fachrurrozi** gubernur tandingan FPI. Ya, **begundal mainnya sama begundal** (PK-6).
2. “Pilihlah Anies dijamin masuk surga” **Bener2 Ajaran Islam Pekok Bin Bahlul** (PK-12).
3. YANG NGETIK BAP POLISI YANG DI BULLY HABIB NOVEL. **AHOK DAN PENDUKUNGNYA OTAKNYA DIMANA?** (DF-10).
4. Muslim yang pilih ahok bukan tak percaya Almaidah 51, tapi karena **tidak percaya Anies** (GP-3).
5. AHY bilang jangan salah pilih Gubernur nyeselnya 5 tahun. Gue mau kasih tau **gue udah ketipus abapaknya selama 10 tahun** (PP-15).
6. Kita pilih gubernur baru, tapi bukan yang **baru belajar jadi gubernur** (GP-4).
7. Maling ayam 3 tahun penjara, **Penista Agama?** (WI-16).

8. Mantan menteri pendidikan ini mengajarkan fungsi meja itu buat duduk, **begitu pandainya beliau sampai lupa jaga attitude** (PC-6).

Penggunaan majas sarkasme pada (1-3) ditandai dengan ungkapan *terlapor kasus pencabulan, pembunuhan, begundal, dan ajaran Islam pekok bin bahlul, otaknya dimana* dan majas sinisme(4-5) dengan *tidak percaya Anis dan udah ketipu 10 tahun* disampaikan secara langsung, terbuka, masif, pedas, dan menohok sehingga 'sangat tinggi' mengancam muka komunitas paslon lainnya. Demikian juga penggunaan majas *ironi* (6-7) meskipun tidak terlalu dominan, namun diksi yang dipilih termasuk kekerasan verbal, yaitu *baru belajar jadi gubernur dan penista agama* serta penggunaan majas antifrasis (8) *lupa attitude* turut mengancam muka positif dan negatif pihak yang dituju.

Berdasarkan data tersebut, penggunaan majas sebagai gaya retorika para pendukung paslon tergolong pada kekerasan verbal, baik berdimensi partisipatif (melibatkan relasi pelaku atau korban), maupun berdimensi tunggal (tidak melibatkan relasi pelaku dan korban), karena berdampak melukai fisik maupun batiniah (Astuti, 2013). Dengan demikian, dari segi kesantunan para pendukung paslon tidak mengindahkan rumusan Grice "pilihlah ungkapan yang tidak meremehkan status mitra tutur atau ungkapan yang paling kecil menyebabkan mitra tutur kehilangan muka" (dalam Pranowo, 2009, hal.362).

Penggunaan Jenis Tindak Tutur

Dalam menyampaikan opininya, jenis tindak tutur yang paling dominan digunakan oleh para pendukung paslon adalah **ekspresif** sejumlah 77 tuturan dalam bentuk *mengumpat* (9), *menghujat* (10), *mengecam* (11), *menyindir* (12), *mencemooh* (13) dan *mengkritik* (14). Selanjutnya, mereka menggunakan jenis tindak tutur **direktif** sejumlah 14 tuturan dalam bentuk *menuntut* (15), *memperingatkan* (16) dan *mempengaruhi* (17); lalu jenis tindak tutur **komisif** sejumlah 3 tuturan dalam bentuk *mengancam* (18); dan **representatif** sejumlah 8 tuturan dengan dalam bentuk *menyatakan* (19), *menyebutkan* (20), dan *melaporkan* (21).

9. **Eh konyuk**, itu namanya Ahok lagi kerja! (PP-10)
10. **Otak sama bacot udah gak nyambung**, malu dong sebagai menteri pendidikan apkiran#ANIESCAGUBBANYAKBACOT(PP-5)
11. HANYA KARENA MINORITAS SEMUA PENGORBANAN DAN KEBAIKAN YANG KITA LAKUKAN ITU KALAH HUKUM KARENA **KEADILAN DIINTERVERENSI OLEH ORMAS RADIKAL!!** (PC-1)
12. SUNAN KALIJODO (Sunan Basuki Nurul Qomar)**Satu-satunya sunan yang tidak sholat** dan mungkin **juga belum disunat.**(WI-24)
13. Ahok murka disebut kafir di persidangan. Terus, maunya disebut ustadz gitu? Yeeechhhh **kaleng khong guan!** (DF-8).
14. Jakarta butuh aksi! Bukan **teori basi atau retorika fantasi** (PP-8)
15. PAK PRESIDEN... JIKA KAU TAKUT BILA PENISTA AL QUR,AN DIPENJARA RAHASIAMU AKAN TERBONGKAR **LEBIH BAIK.... KAU HUKUM MATI SAJA PENISTA AGAMA ITU!**(DF-2)
16. Agamaku adalah kekuatanku maka janganlah engkau **salahkan kitabku** (TL-5)

17. MAU PILIH PASLON 3? **DIJAMIN TIDAK MENYELESAIKAN MASALAH, JUSTRUMENAMBAH MASALAH BARU**(PK-7)
18. Silakan Anda jadikan Ahok sebagai nabi kalian, tapi **jangan sekali-kali nodai Islam** dan perjuangan umat Islam. Atau **kamu akan kami habisi** dengan cara kami? (DF-3).
19. **HANYA KECURANGAN YANG BISA MEMENANGKAN ANIES SANDI** (PK-7)
20. Paslon 3 ibarat **pegepul rongsokan**. Ada **koruptor, ormas radikal, kaum sumbu pendek, bahkan mantan bos prostitusi kalijodoh**(GP-2)
21. Kemesraan Anies, Khilafah, **Radikalisme, dan Terorisme**(GP-6)

Tuturan yang disampaikan dengan tujuan *menyindir, mengumpat, mengecam, mencemooh, mengeluh, mengkritik* serta *menghujat*, dianggap sangat berpotensi mengancam muka pihak yang dituju. Hal ini sesuai dengan skala kesantunan berdasarkan 'nosi keterancaman muka (positif dan negatif)' Brown dan Levinson (1987, hal.62) bahwa "tindakan-tindakan yang mengancam muka negatif adalah ungkapan mengenai kebencian, kemarahan, perintah, peringatan, ancaman, dsb.; sedangkan tindakan yang mengancam muka positif adalah "ungkapan kritik, tindakan merendahkan atau yang mempermalukan, keluhan, dan kemarahan, dakwaan, penghinaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian keseluruhan tuturan di atas merupakan tindakan 'kekerasan verbal' karena dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dan ditulis, berupa memaki, menyindir, sumpah serapah, mengancam, serta mengeluarkan kata-kata kasar (Astuti, 2013, hal.45).

Penggunaan Strategi Bertutur

Para pendukung paslon dalam akun instagram komunitasnya memilih empat strategi dalam menyampaikan komentarnya tentang Pilkada DKI, yaitu strategi *terusterang tanpa basa-basi* (22-23), *kesantunan negatif*(24-25), *kesantunan positif*(26), *samar-samar* (27).

22. Mau pilih **paslon 3? Dijamin tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah baru** (PK-9)
23. **Peradilan sesat. Maling dihukum1 tahun, yang melaporkan maling dihukum 6 tahun** (WI-15).
24. Saya muslim, **saya sedih Ahok dipenjara**, tapi **saya bangga Ahok dihukum mati** (WI-1).
25. Renungan untuk Ahokers muslim. **Ahok dihina** kalian ga terima dan langsung **marah**, tetapi **Al-Quran dihina** kalian **diam** dan biasa saja. Sepertinya **ada yang salah dengan otak dan hati kalian**(DF-1).
26. Ketika **kalian menangis junjungan** kalian **di penjara**, kami juga **menangis ketika Kitab Suci kami dihina** (WI-7).
27. Kita **pilih gubernur baru** tapi **bukan yang baru belajar jadi gubernur** (GP-4).

Lebih separuh (59 data) dituturkan oleh para pendukung paslon dengan *strategi bertutur terusterang tanpa basa-basi*. Fakta ini sangat fenomenal karena para pendukung paslon dengan tekad yang tinggi dan ambisius melakukan segala cara atas pembenaran paslon yang dijagokannya sehingga melanggar norma-norma kesantunan berbahasa. Dari 'skala ketidaklangsungan tuturan', strategiterusterang terusterang tanpa

basa-basi ini termasuk 'tuturan langsung', sedangkan berdasarkan skala 'nosi keterancaman muka' sangat tinggi mengancam muka mitra tuturnya (Brown dan Levinson, 1987, hal.62). Demikian juga tiga strategi berikutnya --kesantunan negatif, kesantunan positif, dan samar-samar-- meskipun termasuk tuturan 'tidak langsung', namun karena pilihan kata dan ungkapannya bernada negatif tetap mengancam muka positif dan negatif pihak yang dituju.

Penggunaan Prinsip Kesantunan

Dari total data, hanya dua tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan, sedangkan 100 tuturan lainnya melanggar prinsip kesantunan, diantaranya *kearifan* (28), *kesimpatian* (29), *kesepakatan* (30), *kedermawanan* (31), *kerendahan hati* (32) dan *pujian*(33).

28. **Tembak mati pelaku makar!**Presiden sedang gencar2nya membangun bangsa guna mewujudkan keadilan sosial, eh lah kok ada yang coba-coba mau makar? **Kalian ini bangsat atau keparat?Dasar manusia jahanam** (PK-11).
29. Kemesraan Anies, **Khilafah, Radikalisme, dan Terorisme** (GP-6).
30. **Muslim yang pilih ahok** bukan tak percaya Almaidah 51, tapi karena **tidak percaya Anies** (GP-3).
31. AHY bilang jangan salah pilih Gubernur nyeselnnya 5 tahun. Gue mau kasih tau **gue udah ketipusamabapaknya selama 10 tahun** (PP-15).
32. **Aksi bela Ahok** hanya **500 orang, bikin ulah** bahkan **anarkis**. Aksi bela islam jutaan orang, damai, rapi dan tak ada yang tersakiti. **BEDA KUALITAS!** (WI-6).
33. "Kalau terima langsung massa aksi 313, Presiden nggak bisa kerja". Kenapa kalo ngurus Kambing ada waktu ya? Pak, sebenarnya **bapak kerja untuk kambing, apa buat rakyat sih?** (WI-29)

Pelanggaran prinsip *kearifan* pada data (28) jelas sekali memaksimalkan kerugian sosial dan psikologis bagi komunitas paslon lain sebagai mitra tuturnya karena memaksa dan mengecam; begitu juga pelanggaran prinsip *kesimpatian* pada data (29) terjadi pemaksimalan rasa antipati terhadap mitra tutur dengan kecaman sepihak, sedangkan pelanggaran prinsip *kesetujuan/kecocokan* pada (30) karena pandangan yang berlebih-lebihan meskipun belum tentu semua orang setuju bahwa yang dimaksud tidak dipercaya. Ketiga pelanggaran tersebut umumnya merupakan pengklaiman sepihak yang belum teruji kebenarannya. Demikian juga pelanggaran prinsip *kedermawanan* pada data (31) dikarenakan terlalu memaksimalkan kerugian sosial tanpa memandang kebaikan sedikitpun pada paslon lain sebagai mitra tuturnya; dan pelanggaran prinsip *kerendahan hati* pada data (32) dikarenakan sindiran tersebut terlalu tajam, tanpa basa-basi, sehingga memaksimalkan rasa tidak hormat pada pihak lawan; begitu juga pelanggaran prinsip *pujian* meskipun datanya tidak dominan ditemukan namun pada data (33) terlalu ironis memperbandingkan manusia dengan binatang, tak ada basa-basi sekitipun atas kebaikan orang, apalagi ditujukan terhadap kepala negara.

Bertolak dari hasil analisis data terhadap empat unsur kesantunan yang ditetapkan sebagai objek kajian dalam penelitian ini (dalam tabel di atas), dapat diklasifikasikan tiga pembahasan sebagai berikut.

Tabel 1. Representasi Kesantunan Berbahasa Komunitas Pendukung Paslon tentang Wacana Polittik Pilkada DKI Jakarta 2017

Element of Politeness						Scale of Politeness					
Diksi/Majas	Jml.	Jenis Tuturan	Jml	Strategi Bertutur	Jml	Prinsip Kesantunan	Me-ma-tuhi	Melang-gar	%	Keteranca-man Muka	Klasifika-si Kesantun-an
Sarkas-me	55	Ekspresif <i>Mengumpat</i> <i>Menghujat</i> <i>Mengecam</i> <i>Menyindir</i> <i>Mencemooh</i> <i>Mengkritik</i>	77	Terus Terang	64	Kearifan		10	62	Tinggi	Tidak santun
Sinis-me	30	Direktif <i>Menuntut</i> <i>Memperingatkan</i> <i>Menghimbau</i> <i>Mempengaruhi</i>	14	Ksntn Negatif	17	Kederma-wanan	1	17	36	Cukup tinggi	Kurang santun
Ironi	16	Komisif <i>Mengancam</i>	3	Ksntn Positif	9	Pujian	1	22			
Anti Frasis	1	Representatif <i>Menyatakan</i> <i>Menyebutkan</i> <i>Melaporkan</i>	8	Samar samar	12	Kerendah-an Hati		7	12	rendah	Sedikit Santun
Inuen-do	-	Deklaratif	-	Dalam Hati	-	Kesepa-katan	1	26			
						Kesimpatian		17			
Total	102	Total	102	Total	102	Total	102	3	99	100	

Pertama, dominannya para pendukung paslon memilih jenis tuturan ekspresif (77 data), strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi (64 data), serta pelanggaran total terhadap prinsip kesantunan (99 data); maka 72 % tuturan berada pada **'tindakan yang mengancam muka'** (*Face Threatening Acts*) dengan tingkat **'tinggi'** karena parameter yang diajukan oleh Brown dan Levinson (1987, hal.65-67) tersebut berupa kritikan, merendahkan, mempermalukan, dakwaan, penghinaan, dll. Dirujuk dari pernyataan Leech (1986, hal. 163-164) yang dihubungkan pada klasifikasi Searle mengenai tindak ilokusi, tuturan ekspresif sebenarnya cenderung "menyenangkan", kecuali ilokusi ekspresif *mengecam*, *mengumpat*, *menghujat*, *menghina*, dan *mengkritik* sehingga berfungsi 'konflikatif' seperti yang ditemukan dalam penelitian ini. Hal ini juga ditambah dengan ungkapan yang bersifat memecah belah, ras, agama, pelecehan, dan identifikasi yang keliru mengenai pasangan calon lainnya sebagai mitra lawan tutur sudah terbukti sangat mengancam **'muka negatif'** dan **'muka positif'** sehingga kesantunan berada pada klasifikasi **'tidak santun'**. Demikian juga halnya dengan parameter 'skala ketidaklangsungan' yang diajukan Blum-Kulka (1985, hal. 14) sudah membuktikan bahwa 'Semakin langsung ungkapan disampaikan, maka semakin tidak santun ungkapan tersebut'. Klasifikasi ini ditandai dengan warna merah dalam tabel di atas yang mengindikasikan bahwa tuturan yang digunakan **'berbahaya'**.

Kedua, pilihan yang agak mendominasi dalam komentar pendukung paslon pada jenis tuturan direktif dan komisif (17 data), majas sinisme (30 data), dan strategi kesantunan negatif (17 data) dan kesantunan positif (9 data), maka 18 % dari tuturan berposisi pada **keterancaman muka** yang **'cukup tinggi'** karena parameter yang diajukan oleh Brown dan Levinson (1987, hal. 65-67) berupa perintah, ancaman, peringatan, tantangan, kebencian, kemarahan, dll. terbukti sangat mengancam **'muka negatif'** dan **'muka positif'** sehingga kesantunan berada pada klasifikasi **'kurang santun'**. Dirujuk dari pernyataan Leech (1986, hal. 163-164) yang dihubungkan pada klasifikasi Searle mengenai tindak ilokusi, tuturan direktif cenderung berfungsi

'kompetitif' karena termasuk kategori ilokusi yang membutuhkan kesantunan negatif. Walaupun pada dasarnya penggunaan strategi bertutur oleh pendukung paslon sudah dupayakan untuk menjaga muka negatif dan positif, namun pilihan ungkapan bernuansa sinis, maka tuturan tersebut tetap digolongkan kurang santun. Klasifikasi ini ditandai dengan warna 'kuning' dalam tabel 2 yang mengindikasikan bahwa tuturan yang digunakan '**cukup berbahaya**'.

Ketiga, pilihan yang kurang dominan dalam komentar para pendukung paslon pada majas ironidan antifrasis (17 data), jenis tindak tutur representatif (8 data), dan strategi bertutur samar-samar (12 data); maka 10 % dari tuturannya berada pada **keterancaman muka** yang '**kurang tinggi**'. Sesuai dengan parameter Brown dan Levinson (1987, hal.65-67) jika tuturan disampaikan dalam bentuk pernyataan, maka tuturan tersebut **kurang berpotensi mengancam 'muka' mitra tutur** sehingga kesantunan berada pada klasifikasi '**agak santun**'. Dirujuk dari pernyataan Leech (1986, hal. 163-164) yang dihubungkan pada klasifikasi Searle mengenai tindak ilokusi, tuturan representatif cenderung netral jika proposisi yang diungkapkan benar. Hal ini sejalan dengan parameter Grice (Pranowo, 2009, hal.362) "pilihlah ungkapan yang tidak meremehkan status mitra tutur..." dan 'skala ketidaklangsungan' Blum-Kulka (1985, hal.14) bahwa "semakin tidak langsung Anda menyampaikan tuturan, maka semakin santun ungkapan Anda". Klasifikasi ini ditandai dengan warna 'hijau' dalam tabel di atas yang mengindikasikan bahwa tuturan yang digunakan '**kurang berbahaya**'.

Meskipun norma berkomunikasi santun sudah dituangkan dalam kaidah unsur-unsur kesantunan oleh para pakar dalam teori Pragmatik, namun, dalam kenyataannya **secara umum** para komunitas pendukung paslon tidak memilih cara yang standar tersebut, tetapi mereka lebih memilih cara yang keras, agak brutal, dan meremehkan status mitra tutur, yang berpotensi tinggi mengancam muka positif dan negatif sehingga mengasikkan tuturan yang 'tidak santun'. Hasil penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahyono (2005, hal. 54), yaitu ciri utama penyampaian informasi di media Pasca-Orde Baru ialah kelugasan yang diikuti dengan bahasa yang hiperbolis dan kasar, seperti kecaman, keluhan, kemarahan, ejekan, serta perendahan. Meskipun penelitian tersebut sudah lama dilakukan, namun faktanya masih terdapat pada wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017, baik di media massa maupun di media sosial. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang beberapa tahun belakangan ini dilakukan oleh Peterson (2015) di India mengenai pers dan demokrasi.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan beberapa hasil penelitian, seperti di USA (Worthama & Locherb, 1999; Dus, Blitvitch, & Franch, 2011); di Liberia (Anderson, Diabah, & Mensa, 2011); di Perancis (Barnes & Larrivee, 2011); di Spanyol (Bermudez, 2014); di Pakistan (Yasmeen, Jabeen, & Akram, 2014); di Indonesia (Yusri, 2015); dan di Polandia (Cap, 2017). Dari penelitian tersebut terlihat bahwa penggunaan bahasa sebagai sarana politik bisa saja menjadi tidak baik. Selain itu, hal tersebut juga tidak hanya dilakukan oleh para politikus, melainkan elemen-elemen lain yang berkaitan dengan politik seperti, masyarakat dan jurnalis, serta sebagian besar terjadi dalam ranah komunikasi massa di media sosial.

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan dalam lima poin. *Pertama*, majas yang digunakan sebagai gaya retorik oleh komunitas

pendukung paslon dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta didominasi majas sarkasme dan sinisme sehingga penyampaian opini berada pada kategori kekerasan verbal. *Kedua*, tindak tutur yang digunakan oleh komunitas pendukung paslon didominasi oleh jenis ekspresif dalam bentuk mengumpat, menghujat, mencemooh, menyindir, dan mengkritik sehingga opini yang mereka sampaikan mengandung kekerasan verbal. *Ketiga*, pilihan yang dominan atas strategi bertutur terus-terang tanpa basa-basi, maka komentar yang disampaikan tergolong pada kekerasan verbal. *Keempat*, dominannya pelanggaran terhadap prinsip kesantunan daripada pematuhan, mengindikasikan bahwa komentar mereka berada pada ranah kekerasan verbal. *Kelima*, tingkat kesantunan para pendukung paslon dalam mengomentari wacana Pilkada DKI Jakarta 2017 dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu (1) bertutur 'tidak santun' (62%), (2) bertutur 'kurang santun' (36%), dan (3) bertutur 'agak santun' (12%). Ditilik dari persentase yang digunakan, meskipun masih ada yang bertutur kurang santun dan agak santun, namun secara dominan tingkat kesantunan berbahasa komunitas pendukung paslon dalam wacana Pilkada DKI berada pada posisi 'tidak santun'.

Rujukan

- Adek, M. (2019, January 10). *Analisis perbandingan wacana kampanye hitam dan putih tentang Jokowi pada pilpres 2014 dan pergerakan wacananya*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/gwhju>
- Agustina. (2017). Kekerasan verbal dalam Pilkada DKI: mengungkap tingkat kesantunan masyarakat berwacana politik. *Prosiding Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Gamitan Masyarakat Multikultural*. Padang: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Universitas Padang.
- Anderson, J.A., Diabah, G., & Mensa, P.A. (2011). Powerful woman in powerless language: media misrepresentation of African women in politics (the case of Liberia). *ELSEVIER: Journal of Pragmatics*. 43(10), 2509-2518.
- Aryani, H. S. (2015). *Panduan baku majas. EYD, peribahasa, kata baku dan kata tidak baku*. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Astuti, S. I. (2013). Patologi kekerasan dalam berita televisi: antara kontroversi dan regulasi. *MIMBAR*, 29(1), 41-48.
- Barnes, J., & Larrivee, P. (2011). Alette Laguiller: does the mainstay of the French political far-left enjoy linguistic parity with her male counterparts. *ELSEVIER: Journal of Pragmatics*. 43(10), 2501-2508.
- Bermudez, N. (2014). Las emociones en el discurso político. "Pathograma" del kirchnerismo. *Journal of Pragmatics*. 35(1), 11-43.
- Brown, P & Levinson, S. (1987). *Politenes: Some universal in language usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Blum-Kulka, S. (1987). Indirectness and politeness in requests: Same or different? *Journal of pragmatics*, 11(2), 131-146.

- Cap, P. (2017). Studying ideological worldviews in political discourse space: critical-cognitive advances in the analysis of conflict and coercion. *ELSEVIER: Journal of Pragmatics*. 118(1), 17-27.
- Chaer, A. (2010). *Psikologi pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dus, N.L., Blitvich, P.G.C., & Franch, P.B. (2011). Online polylogues an impoitness: the case of postings sent in responses to the Obama reggaeton youtube video. *ELSEVIER: Journal of Pragmatics*. 43(10), 2578-2593.
- Endaswara. (2011). *Metodologi penelitian sastra: Epistemologi, model, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: LKIS.
- Erdinaya & Ardianto. (2001). *Mass communication: An Introduction*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Gunarwan, A. (1994). *Kesantunan negatif di kalangan dwibahasawan Indonesia-Jawa di Jakarta: kajian sosiopragmatik*. Jakarta: Unika Atmajaya.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi: Manipulasi media, kekerasan, dan pornografi*. Jogja: Kanisius.
- Keraf, G. (2006). *Diksi dan gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Leech, G. (1986). *Prinsip-prinsip pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nababan, P. W. J. (1987). *Ilmu pragmatik: Teori dan praktek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peterson, M.A. (2015). Speaking of news: Press, democracy, and metapragmatics in a changing India. *American ethnologist: Journal of American ethnological and society*. 42(4), 673-678.
- Pranowo. (2009). *Berbahasa Secara santun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardi, R. K. (2000). *Kesantunan imperatif dalam bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Duta Wacana.
- Rahyono R. X. (2005). The wisdom of language: a pragmatic study on the profile of the post-new order era mass media language. *Jurnal Makara, Sosial, Humaniora*. 9(2), 46-56.

- Syahrul, R. (2008). *Pragmatik kesantunan berbahasa menyibak fenomena bahasa Indonesia guru dan siswa*. Padang: UNP Press.
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, H. G. (2013). *Pengajaran gaya bahasa*. Bandung: Angkasa.
- Worthama, S., & Locherb, M. (1999). Embedded metapragmatics and lying politicians. *ELSEVIER: Journal of Pragmatics*. 19(2), 109-125.
- Yasmeen, R., Jabeen, & M., Akram, A. (2014). Politeness and language of Pakistani politicians. *SAVAP Internasional*. 3(5), 245-253.
- Yule, G. (2006). *Pragmatik* (Terj. Indah Fajar Wahyuni). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusri. (2015). Pelanggaran kesopanan berbahasa dalam komunikasi politik pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2013. *PAROLE: Jurnal of Linguistic and Education*, 5(1), 26-39.